

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi ideologi demokrasi. Penyelenggaraan negara demokrasi seperti layaknya gambaran masyarakat terkait dengan demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum dalam periode tertentu. Pemilihan umum sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi di sebuah negara termasuk di Indonesia berdasarkan amanat Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) yang disepakati sebagai pedoman penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan, cita-cita berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Pemilihan Umum merupakan suatu bentuk dan mekanisme penyaluran pendapat. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, demikian pula penegasan Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara hukum memberi kualifikasi bahwa demokrasi Indonesia bergerak dalam batasan hukum. Pelaksanaan demokrasi bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu. Kepentingan rakyat dapat didengar dan turut menentukan proses kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2008:739). Untuk itu dalam memilih wakil-wakil rakyatnya (legislatif) dan juga memilih para pejabat publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan (eksekutif), pemilu diadakan secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali, hal ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan negara Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2008:741).

Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sikap dan hati nurani itu dijamin secara tegas oleh Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan “pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Ketentuan pasal ini dianggap sebagai fundamental, sehingga dianggap sebagai hak asasi manusia, seperti yang ditentukan pula dalam Pasal 28 I ayat (1) . Pasal itu menyatakan bahwa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, adalah *condition sine qua non* (pasyarat mutlak) bagi tegaknya mekanisme *check and balances* yang dianut oleh UUD NRI 1945. Pembagian kekuasaan antara eksekutif legislatif, yudikatif akan bermakna bila ada kewenangan untuk saling mengimbangi diantara cabang kekuasaan itu. Kemampuan saling mengimbangi hanya akan melalui relevansi dengan aspirasi masyarakat luas bila ada kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pikiran bagi warga, kebebasan berserikat dan berkumpul juga merupakan perkembangan landasan demokrasi yang sehat. Kebebasan *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun maka seharusnya *freedom of association* sebagai penyalurannya juga tidak dapat dikurangi, karena itu pengaturannya menurut Pasal 28 dan 28 J, pengaturan dan pembatasan itu harus didasarkan atas suatu *reasonable ground* (alasan rasional yang masuk akal) dengan maksud untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2006:147). Oleh karena itu partai politik merupakan perwujudan partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Perubahan konstitusi pasca Pemilu tahun 1999 menjadikan partai politik sebagai organisasi dominan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses

pembahasan materi-materi perubahan konstitusi sangat diwarnai oleh pertimbangan kepentingan partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR/MPR. Pertimbangan rasional berjangka jauh yang disampaikan oleh para akademisi dan ahli cenderung diabaikan (Valina Singka Subekti, 2008: 317). Bahkan gagasan publik untuk membentuk Komisi Konstitusi, juga ditolak karena hal itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Alasan utama penolakan itu tidak lain adalah demi mengamankan kepentingan partai politik. Perdebatan materi perubahan konstitusi, tidak lepas dari dinamika politik yang sedang berkembang saat itu, misalnya pertentangan sejumlah partai politik dengan pihak eksekutif, sangat mewarnai pandangan partai politik dalam merumuskan ketentuan-ketentuan tentang kepresidenan (Denny Indrayana, 2007: 244). Dominasi dalam Struktur Ketatanegaraan dalam proses pembahasan perubahan UUD NRI 1945 di mana partai politik mempunyai peran besar dan cenderung mengabaikan partisipasi publik, maka rumusan-rumusan perubahan konstitusi akan cenderung menguntungkan posisi partai politik. Hal ini kontras dengan naskah aslinya yang sama sekali tidak menyebut posisi dan fungsi partai politik, bahkan kata “partai politik” tidak terdapat di dalamnya. Jika sebelumnya peran partai politik hanya disebutkan melalui wakil-wakilnya di DPR, yang kemudian bergabung dengan utusan daerah dan golongan menjadi MPR, kini posisi DPR selaku lembaga legislatif diperkuat untuk mengimbangi posisi dan fungsi presiden sebagai kepala eksekutif. Fungsi legisalasi diperkuat dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, yang menjadikan presiden tidak bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa melibatkan DPR (Saldi Isra, 2010: 177). Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang dapat melakukan kaderisasi untuk melahirkan pejabat publik, merumuskan rancangan kebijakan publik lewat perwakilannya di parlemen. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan individu dan kelompok ke dalam masyarakat dan sistem politik. Tidak ada Negara demokrasi tanpa politik, tidak

ada politik tanpa partai politik, karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negara (*the citizen*). Partai politik merupakan komponen atau aktor yang sangat strategis dalam percepatan dan penguatan demokrasi sebagai acuan dalam pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Demokrasi telah disepakati sebagai acuan untuk mencapai cita-cita negara sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Permasalahan partai politik di Indonesia dewasa ini, terutama di Era Reformasi, adalah ketidak patuhan partai politik terhadap penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selanjutnya Undang-Undang Tentang Partai Politik dan perubahannya disebut (UU No. 2/2008 dan UU No.2/2011) terdapat hal-hal pokok diantaranya adalah tentang Keterbukaan informasi atau transparansi dan Akuntabilitas keuangan partai politik. Partai politik sebagai wadah perjuangan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka haruslah menjunjung tinggi terhadap keterbukaan informasi publik. Setiap kegiatan organisasi pastilah memerlukan dana untuk melaksanakan kegiatan organisasinya, begitu pula partai politik sebagai organisasi politik yang sah berdasarkan hukum dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Partai politik memerlukan sumber dana agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik. Proses politik yang demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan, tanpa dana memadai, partai politik tidak bisa mengorganisasi partainya, tidak akan dapat berkomunikasi dengan masyarakat/publik. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan tujuan, tugas dan fungsinya, baik sebagai

jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu (Sidik Pramono, 2011: 3).

Sebagai pelaku proses politik yang dominan, partai politik mempunyai permasalahan yang dikemudian hari harus diperbaiki agar proses demokrasi berjalan lebih baik. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai laporan keuangan dalam partai politik yang dibuat oleh partai politik di Indonesia belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 selanjutnya disebut (Permendagri No. 24/2009 dan Permendagri No. 26/2013) Tentang Pedoman Tata cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan Penyaluran Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Selain laporan yang tidak sesuai dengan standar, alokasi anggaran parpol juga tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Partai politik juga belum sepenuhnya terbuka dalam laporan keuangan mereka terhadap publik. Banyak parpol yang belum memiliki Petugas Pengelola Informasi dan Data di daerah, dan memiliki standart pencatatan keuangan yang minimalis, serta belum sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Berdasarkan fakta yang ada, sebagian subsidi APBN dihabiskan untuk biaya operasional partai, sedangkan biaya pendidikan politik yang seharusnya jadi pos utama yang diberi anggaran paling besar justru diabaikan (www.tempo.com/parpol/belum/transparan/akuntabel/read/news diakses 1 september 2014 pukul 21.07). Pembahasan dana partai politik tidak bisa lepas pula dari dana kampanye. Pemahaman umum banyak yang mengira bahwa dana partai politik (kas umum parpol), sama dengan dana kampanye (kas khusus partai politik sebagai dana kampanye), sebenarnya berbeda karena sumber dana, penggunaan dan pembukuannya berbeda. Hal ini masih terjadi carut marut dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara/Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut (APBN/APBD). Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang atau tidak akan diperoleh. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Walaupun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selanjutnya disebut Kemendagri tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya. Selain hal tersebut Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam melakukan uji informasi terhadap badan publik termasuk juga partai politik, guna mengukur keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dari 12 partai hanya 4 partai saja yang mengembalikan kuesioner penilaian mandiri. Ke empat Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dari nilai maksimal 100, perolehan nilai partai politik tergolong masih sangat buruk dibanding kategori badan publik lainnya. Partai Gerindra yang menjadi peringkat pertama hanya meraih nilai 57. Ditempat kedua, ketiga dan keempat berturut-turut adalah PKS dengan nilai akhir 31, PKB dengan nilai akhir 22 dan PAN dengan nilai akhir 16 (www.hukumonline.com, 13 September 2012, diakses 17 desember 2014). Hal tersebut menunjukkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih rendah dan belum sepenuhnya tunduk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Selanjutnya disebut (UU No. 14/2008). Berlakunya UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang tersebut memberi jaminan terbukanya akses informasi bagi masyarakat terhadap badan publik termasuk di dalamnya adalah partai politik. Badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi dan membuka akses informasi kepada masyarakat, tidak ada alasan bagi badan publik untuk tidak melayani permintaan informasi yang menjadi milik publik. Partai politik memang bukan lembaga negara pada tingkat eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Tetapi partai politik sangat berperan penting dalam mendistribusikan kadernya kepada lembaga-lembaga negara. Dengan demikian partai politik bertanggung jawab dalam menata lembaga-lembaga negara yang notabene berfungsi sebagai badan publik, apalagi salah satu sumber pendanaan partai politik yakni dari APBN/APBD dengan demikian partai politik berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya secara terbuka/transparan dan akuntabel kepada publik. Partai politik secara tegas juga diatur dan disebutkan dalam pasal 15 UU No. 14/2008.

Berdasarkan pemaparan di atas maka hal-hal yang dikemukakan tersebut mendasari dan melatarbelakangi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“KETERBUKAAN INFORMASI DAN AKUNTABILITAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI ANGGARAN NEGARA TERHADAP PUBLIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik ?
3. Bagaimanakah tinjauan yuridis keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Suatu Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan Penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui mekanisme bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik Di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan yuridis keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara mengenai keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik.
 - b. Untuk memperoleh bahan dan informasi yang dibutuhkan sebagai penulisan karya ilmiah, sekaligus melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain.

Karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara (HTN) pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya referensi, literatur kepustakaan, selain itu dapat di pakai sebagai bahan materi pengajaran bidang Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Partai Politik, serta bisa menjadi sumber yang bermanfaat bagi penelitian atau penulisan karya ilmiah mendatang mengenai keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan penalaran, pemahaman, pembentukan pola pikir yang dimamis dan sistematis, serta melatih sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- b. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) terkait dengan masalah yang sedang diteliti, serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Sedangkan

metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Jhony Ibrahim, 2006: 26). Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan, untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap masyarakat atau publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi partai politik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum adalah sejalan dengan hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

Penulisan penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, karena melihat pada tujuan hukum yang diharapkan yaitu terbukanya informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik terhadap publik atau masyarakat luas, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, didukung dengan validitas aturan-aturan hukum, konsep-konsep hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku bagi partai politik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan (PPH, 2009: 6). Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93):

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*):
- 2) pendekatan kasus (*case approach*):

- 3) pendekatan historis (*historical approach*);
- 4) pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan
- 5) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) .

Dari pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang disebutkan diatas, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam metode pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini, penulis mencoba menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan partai politik, dimana partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara demokrasi di Indonesia.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan Tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- 7) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- 11) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2014 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini yaitu: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, hasil penelitian-penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, tulisan/artikel dari media internet dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan untuk mendukung penelitian atau penulisan hukum ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, kegiatan pengumpulan bahan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen/kepastakaan (*Library Research*). Studi dokumen/kepastakaan adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui membaca, mempelajari dan mengkaji, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, mengumpulkan dan menyusun secara terperinci bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepastakaan dalam penelitian ini, dianalisis dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduksi silogisme. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan deduksi ini berpangkal

dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sebagai upaya untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, yaitu meliputi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritis berdasarkan literatur-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

- A. Kerangka teori meliputi:
 - 1. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik;
 - 2. Tinjauan Umum Tentang Sumber Keuangan Partai Politik;
 - 3. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara;

4. Tinjauan Umum Tentang Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas.

B. Kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran dari kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penulisan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab mengenai pokok permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

- A. Mekanisme bantuan keuangan kepada partai politik dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia.
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik.
- C. Tinjauan yuridis keterbukaan informasi dan akuntabilitas bantuan keuangan partai politik dari anggaran negara terhadap publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum, yang terdiri dari:

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN